



SALINAN PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Setiyo Arianito, S.H. dan Pekik Widiyanto Syahbandono, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Raya Kaliori No.20 C Banyumas 53191 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 231/2024 tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007 , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No : 518/85/VI/2007
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon tinggal tinggal bersama di pondok pesantren di Bogor selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,kemudian Pemohon bekerja di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) ;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3(tiga) orang anak yang bernama NAILUL BARAKAT (lahir Depok, 30 Juni 2010/umur 13 tahun 8 bulan), NIDAA AN KHOFIYYA (lahir Banyumas, 06 Oktober 2016/umur 7 tahun 4 bulan),NAJMU TSAAQIB (lahir Banyumas,25 Mei 2019/umur 4 tahun 9 bulan) anak sekarang ikut termohon
4. Bahwa serjak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Masalah ekonomi kurang dimana Termohon selalu mengeluh nafkah yang di berikan Pemohon kurang padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon
 - Termohon enggan melayani kebutuhan batin Pemohon di karenakan Termohon takut untuk memiliki anak kembali

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms



- Bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang dan tinggal di rumah orangtua Pemohon

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di RT.01`/RW.01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx , sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx xx x xxx xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,(sekarang sudah pisah 7 bulan) hingga sekarang permohonan cerai talak diajukan pada Pengadilan Agama Banyumas.

6. Bahwa Kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Perceraian/ ijin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Banyumas;

8. Bahwa dalil dalil Permohonan cerai talak telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak/Permohonan Ijin Ikrar Talak dari Pemohon.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas.
3. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Setiyo Arianto, S.H. dan Pekik Widiyanto Syahbandono, S.H. dan ..., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Raya Kaliori No.20 C Banyumas 53191 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 231 tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal ... dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 231/2024 tanggal 5 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mumun Muhaemin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Nana, S.Ag., M.H.

ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Mumun Muhaemin, S.Sy

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 28.000,- |
| 4. PNB | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 173.000,- |

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin